



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

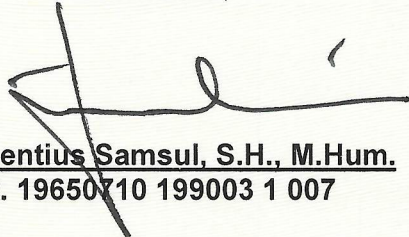
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007


Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
NIP. 19711111 199603 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pendampingan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	1. Jumlah Penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	55 perkara
2.	Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		3. Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,26
		5. Nilai IKPA Mini Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	96
		- Revisi DIPA	9,60
		- Deviasi Halaman III DIPA	19,20
		- Penyerapan Anggaran	24,00
		- Penyelesaian Tagihan	14,40
		- Capaian Output	28,80
		6. Persentase Realisasi Anggaran	98%

Program	Anggaran
Satker Dewan	Rp3.866.432.000,00
Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	Rp3.866.432.000,00
Satker Setjen	Rp4.155.372.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp4.155.372.000,00

Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007

Jakarta, 8 Januari 2025
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang,

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
NIP. 197111111996031001

